

Dampak Advokasi *International Non-Governmental Organization* pada Pasar Foie gras di Eropa

Nurul Qomariyah Maulidina & Wahidah Zein Br Siregar

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan oleh beberapa International Non-Governmental Organization (INGO) yang berfokus pada pembelaan terhadap hak-hak hewan serta dampaknya terhadap pasar di Eropa. INGO-INGO ini mengancam adanya praktik kekejaman terhadap hewan seperti yang terjadi dalam proses produksi, salah satu makanan tertua di Eropa yang juga merupakan gastronomi Prancis. Mereka melakukan beberapa advokasi untuk mengungkap kekejaman produksi kepada masyarakat luas. Advokasi yang dilakukan oleh INGO-INGO tersebut telah mendapat banyak keberhasilan. Beberapa pihak, misalnya, mulai berhenti menyediakan dan mengonsumsi sehingga hal tersebut mempengaruhi pasar di Eropa. Guna menganalisis dampak advocacy tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumen dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Konsep yang digunakan adalah INGO sebagai aktor non-negara yang juga memiliki peran besar dalam menangani permasalahan pada kesejahteraan hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan INGO menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak pada pasar di Eropa. Beberapa data menunjukkan penurunan jumlah produksi Foie gras secara signifikan.

Kata Kunci: *Dampak; Advokasi, INGO, Foie gras, Eropa.*

Abstract

This research discusses some of the advocacy done by International Non-Governmental Organization (INGO) that concern on animal rights and their impacts on the Foie gras market in Europe. These INGOs certainly condemn the practice of animal cruelty that occurs in the production process of Foie gras one of Europe's oldest foods that is also French gastronomy. These INGOs did some advocacy to expose the cruelty of Foie gras production to the general public. The advocacy they carried out has gotten a lot of success. Some parties began to stop providing and consuming Foie gras, so that it affects on the Foie gras market in Europe. Data for this research are collected from relevant documents. A qualitative approach with descriptive data presentation are applied. The concept used to help the research analysis is INGOs as non-state actors who also have a big role in dealing with problems in animal welfare. To analyze how INGO strategies use transnational advocacy theory from Keck & Sikkink. The results show that advocacy by INGOs is one of the factors that have an impact on the Foie gras market in Europe with some data showing a decrease in production.

Keywords: *Impact; Advocacy; INGO; Foie gras; Europe.*

Pendahuluan

Isu dalam Hubungan Internasional mengalami perluasan setelah berakhirnya Perang Dingin. Salah satunya adalah mengenai kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Sudah banyak INGO yang memperjuangkan *animal welfare* ini. Bahkan beberapa wilayah termasuk Uni Eropa telah menjadikan *animal welfare* sebagai salah satu dasar untuk menetapkan regulasinya.

Komisi Uni Eropa, misalnya, telah mempromosikan *animal welfare* selama lebih dari 40 tahun. Kebijakan ini juga turut diikuti oleh negara-negara anggotanya. *Animal welfare* di Uni Eropa meliputi lima kebebasan; bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, kebebasan untuk mengekspresikan perilaku normal, dan kebebasan dari rasa takut dan tertekan. Akan tetapi, terdapat salah satu makanan tertua di Eropa yaitu *Foie gras* yang kontroversial karena cara produksinya tidak memenuhi aspek-aspek *animal welfare* seperti yang sudah ditetapkan Uni Eropa (Broom 2017). *Foie gras* adalah salah satu gastronomi Prancis yang paling terkenal dan tergolong sebagai “*Protected Cultural and Gastronomic Heritage*” (Heath & Meneley 2010). Kata *Foie gras* sendiri berasal dari Bahasa Prancis yang berarti ‘hati yang berlemak’. Sesuai dengan namanya, hidangan ini terbuat dari hati angsa dan bebek yang bertekstur sangat lembut. Rasanya yang bermentega dan lembut menjadikan *Foie gras* sebagai menu dengan banyak peminat di berbagai negara. Dikenal dengan kelezatannya, *Foie gras* banyak disajikan di hotel dan restoran mewah dengan harga yang cukup mahal.

Secara detail, produksi *Foie gras* dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, bebek yang masih kecil diberi makan secara teratur sejak menetas hingga umur 6 sampai 9 minggu yang dipelihara di dalam ruangan, terkadang di atas jerami. Tahap selanjutnya, unggas kemudian dibatasi pemberian makannya selama jangka waktu 3 sampai 5 minggu. Pembatasan ini mungkin dalam waktu pemberian makannya atau jumlah makan yang dikurangi. Selama 3 sampai 10 hari berikutnya, burung diberi makan sebanyak-banyaknya. Tenggorokan bebek akan dimasukkan sebuah tabung dan dipompa untuk memasukkan 2 pon makanan ke dalam perut bebek yang dilakukan secara berkali-kali dalam sehari. Padahal normalnya bebek hanya memakan beberapa ratus gram perhari. Hal ini untuk melebarkan kerongkongan, merangsang sekresi pencernaan yang diperlukan untuk makanan dalam jumlah besar, dan memulai proses penggemukan hati. Berat hati bisa mencapai 180 gram pada akhir tahap ini, dibandingkan dengan 80 gram jika bebek diberi makan secara normal (*Animal Equality UK* 2019). Pemberian makan paksa tersebut berpotensi menyebabkan kecacatan. Alan Soloman (2007) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa terdapat potensi amiloid pada hati bebek yang diberi makan paksa.

Tidak hanya itu, di sejumlah pabrik peternakannya, bebek dijejalkan bersama di kandang yang remang-remang dengan bau asap amoniak yang dihasilkan dari limbah pabrik. Hal ini menyebabkan bebek memiliki keterbatasan untuk bergerak karena mempunyai sedikit ruang (*Animal Equality* UK 2019). Itulah mengapa praktik dalam produksi *Foie gras* tidak memenuhi kesejahteraan hewan karena pemberian makan paksa yang menyakiti hewan dan kandang yang digunakan mencegah hewan tersebut untuk berperilaku secara alami.

Pengaruh negatif tidak hanya akan dirasakan oleh bebek yang diberi makan paksa. Namun juga akan dirasakan oleh orang-orang yang mengkonsumsinya, karena *Foie gras* mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi. Dimana 85 % kalornya dari lemak. Satu porsi *Foie gras* dengan berat 2 ons akan mengandung 25 Gram lemak dan 85 miligram kolesterol (PETA, 2003). Sebagian besar masyarakat masih kurang menyadari dampak buruk *Foie gras* pada kesehatan. Kontroversi ini menyebabkan banyak pihak dari masyarakat internasional yang mengecam praktik makan paksa pada produksi *Foie gras*. Karena gastronomi yang selalu dipromosikan oleh Prancis dan dihidangkan secara turun-temurun merupakan hidangan yang dihasilkan dari penyiksaan hewan dan dapat berpengaruh negatif pada konsumennya.

Oleh karena itu, beberapa negara melarang menu tersebut. Larangan tersebut ditujukan pada proses produksinya yang dilakukan dengan cara paksa. Negara-negara yang telah melarang kejamnya proses produksi *Foie gras* antara lain Inggris, Republik Ceko, Denmark, Italia, Finlandia, Jerman, Irlandia, Israel, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Swiss, Argentina, dan India (Fine Dining Lovers 2016).

Kekejaman pada produksi *Foie gras* ini juga mendapat perhatian dari INGO-INGO yang memperjuangkan *animal welfare*, seperti *Animal Equality*, *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA), *Compassion in World Farming*, *World Animal Protection*, *World Wildlife Fund* (WWF), *Four Paws*, *Nature Watch Foundation Advancing Animal Welfare*, *Animal Aid*, dan organisasi-organisasi lainnya. INGO-INGO tersebut telah melakukan banyak sekali advokasi untuk menghentikan dan penolakan *Foie gras*. Advokasi yang dilakukan juga bermacam-macam mulai dari demonstrasi, kampanye melalui media sosial, mendesak restoran dan toko yang menjual *Foie gras* untuk tidak lagi menjual menu tersebut, bekerjasama dengan artis terkenal, dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang terkait larangan *Foie gras*. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi INGO yang memperjuangkan *animal welfare* untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kejamnya proses produksi pada industri *Foie gras* supaya masyarakat mulai berhenti mengonsumsi *Foie gras* sehingga produksi *Foie gras* dapat berkurang.

Memiliki banyak peminat di berbagai negara, *Foie gras* juga diproduksi di Amerika dan Asia. Namun produsen terbanyak yaitu di Eropa yang mencapai angka 21.000 ton produksi *Foie gras* pada tahun 2016 (19.000 ton *Foie gras* bebek dan 2.000 ton *Foie gras* angsa), secara keseluruhan angka tersebut mencakup sekitar 95% dari *Foie gras* di dunia. Sebagian besar diproduksi di Prancis sebanyak 13.843 ton. Diikuti oleh Hungaria sebanyak 3.065 ton dan Bulgaria sebanyak 2.700 ton. Sedangkan konsumen utama juga ada di Prancis yang mencapai angka 14.570 pada tahun 2016 (*Animal Equality UK 2019*). Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, pasar *Foie gras* di Eropa mengalami ketidakstabilan. Beberapa sumber menyatakan bahwa tidak stabilnya pasar *Foie gras* di Eropa disebabkan oleh wabah flu burung, namun flu burung tidak menjadi satu-satunya faktor. Terdapat beberapa faktor lainnya seperti pandemi Covid-19, kenaikan harga, penurunan produksi, dan juga masalah etika yang diangkat oleh INGO. Hal ini karena upaya yang dilakukan oleh INGO telah memberikan pengaruh tersendiri pada pasar *Foie gras*, khususnya di Eropa. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan meyakini perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh aktor non-negara khususnya INGO dalam mempengaruhi permasalahan internasional ini. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimana dampak advokasi INGO pada pasar *Foie gras* di Eropa?”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif sebagaimana tujuan peneliti ini adalah untuk menggambarkan bagaimana dampak advokasi INGO pada pasar *Foie gras* di Eropa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena terkait dengan menghasilkan data yang berupa kata-kata, tulisan, dapat juga berupa gambar, figur, audio, dan lain-lain. Data-data tersebut diperoleh melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan informasi online yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan metode analisis data menggunakan model analisis dari Miles & Huberman yang mencakup tiga tahapan yaitu reduksi data (menyederhanakan data), penyajian data, yang terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al. 2014).

Tahap pertama adalah kondensasi dengan menyederhanakan data yang diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Data yang digunakan sebagai referensi hanya yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah mendapatkan data yang lebih spesifik dari hasil reduksi, informasi data yang lebih relevan dengan topik penelitian akan disajikan secara rinci oleh peneliti. Tahap inilah yang disebut sebagai display data yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian

yang dilakukan. Pada tahap yang terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari semua informasi dan data yang sudah dinarasikan dalam hasil dan pembahasan. Untuk teknik validasi data menggunakan metode triangulasi melalui analisis dokumen untuk membandingkan dan memvalidasi keaslian data yang diperoleh dengan data lain. Melalui penggunaan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan menjamin keabsahan data yang dikumpulkan.

Landasan Konseptual

Terdapat beberapa definisi mengenai *International non-Governmental Organization* (INGO) dari para ahli. Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan INGO sebagai suatu organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai mekanisme bagi kerjasama diantara kelompok swasta nasional dalam banyak urusan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, humanitarian dan teknis. Inilah yang dimaksud bahwa INGO dapat menanggapi suatu permasalahan yang terjadi dalam lintas batas negara. Karns dan Mingst mendefinisikan INGO sebagai suatu organisasi beranggotakan individu atau asosiasi yang berusaha untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama terutama bagi manusia itu sendiri. Sedangkan menurut David Lewis, seorang filsuf terkenal dari Amerika, INGO adalah solusi baru dalam pemecah permasalahan pemerintah, juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik dimana sebuah INGO dapat didefinisikan sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Damayanti 2020).

Banyak sekali organisasi-organisasi saat ini yang dapat disebut sebagai INGO. Pada intinya, INGO merupakan organisasi nirlaba yang tidak dikendalikan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, kegiatan INGO ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena memiliki kepentingan sosial dan lingkungan, INGO biasanya didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki ketertarikan pada isu yang sama. Terdapat dua fungsi utama dari INGO yaitu sebagai operasional dan sebagai advokasi (Damayanti 2020). Fungsi operasional INGO berkaitan dengan desain dan implementasi program dengan tindakan nyata yang secara langsung mengarah pada perubahan kondisi manusia, artefak budaya, atau lingkungan alam. Sementara fungsi INGO sebagai advokasi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, opini dan praktik otoritas, badan usaha, kelompok sosial dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, INGO tergolong sebagai aktor non-negara dalam studi Hubungan Internasional yang dapat menjadi alternatif untuk menangani isu dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat nasional. Mereka yang bergabung dengan INGO karena ingin berkontribusi dengan cara turun langsung menyelesaikan permasalahan. Mereka tidak bisa menunggu pemerintah yang belum tentu memperhatikan permasalahan yang ada. Hal ini karena keterbatasan partisipasi dan ekspresi yang melekat ketika arena internasional dikendalikan secara fundamental oleh negara. INGO telah merancang saluran tindakan baru yang memungkinkan mereka lebih bebas. INGO tidak hanya melintasi batas nasional, namun mereka juga telah menciptakan bentuk diplomasi non-pemerintah yang langsung dan independent melalui jaringan mereka sendiri. Pengaruh INGO telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir justru karena mereka berbeda dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan.

INGO merupakan salah satu aktor utama yang memainkan peran sentral dalam teori *Transnational Advocacy Network* (TAN). Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam bukunya yang berjudul *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, disebutkan bahwa teori TAN bertujuan untuk mengasosiasikan aktivis dari berbagai negara dengan visi dan misi yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan hak asasi dan lingkungan. Tidak hanya itu, TAN juga digunakan sebagai suatu cara untuk menekan pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu untuk mengadopsi kebijakan yang lebih baik. Teori TAN ini mengedepankan perluasan jangkauan informasi di antara pihak-pihak yang memiliki nilai bersamaseperti perlindungan lingkungan, HAM, dan keadilan sosial. Pada intinya, TAN ini mencakup para aktor yang bekerja secara internasional untuk menangani suatu permasalahan yang ada (Keck & Sikkink 1998).

Fungsi dari teori TAN ini untuk melihat bagaimana organisasi internasional membentuk suatu jaringan yang terstruktur untuk mencapai tujuannya dengan berupaya mengubah regulasi atau kebijakan yang bertentangan. Terdapat empat tipologi strategi yang dirumuskan oleh Keck dan Sikkink untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh jaringan tersebut (Keck & Sikkink 1999). Diantaranya yaitu politik informasi (*information politics*) sebagai kemampuan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan kredibel ke tempat dimana informasi tersebut akan mempunyai dampak paling besar, politik simbolik (*symbolic politics*) sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan, atau beberapa cerita untuk mendapatkan atensi dari masyarakat luas, kemudian ada memanfaatkan politik (*leverage politics*) sebagai kemampuan untuk memanggil aktor-aktor kuat dan berpengaruh guna memperkuat jaringannya, strategi yang terakhir adalah politik akuntabilitas (*accountability politics*) sebagai upaya mendorong aktor

yang memiliki pengaruh lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori TAN untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh INGO dalam tujuannya menghentikan produksi *Foie gras* dan bagaimana pengaruhnya.

Hasil Penelitian

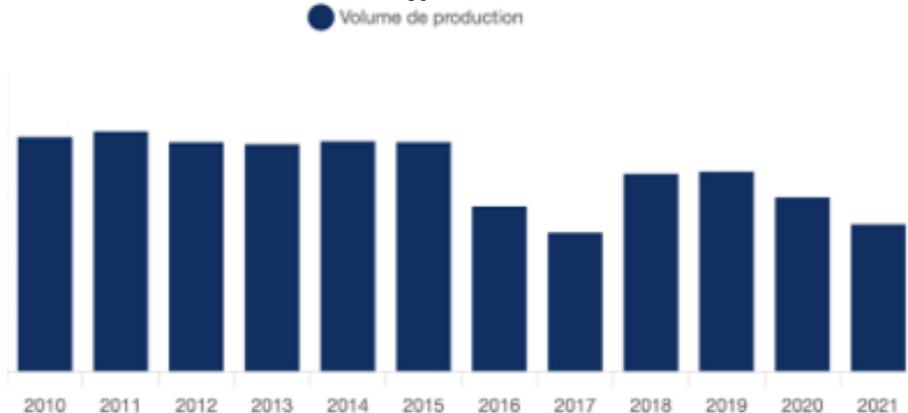
Advokasi yang dilakukan oleh banyak INGO yang memperjuangkan *animal welfare* telah mendapatkan banyak keberhasilan dalam menolak *Foie gras*. Untuk mencapai tujuannya, INGO melakukan beberapa strategi sebagaimana jaringan advokasi transnasional sehingga dapat mengungkap kekejaman dalam produksi *Foie gras*. Mulai dari investigasi, demonstrasi, kampanye, sosialisasi melalui berbagai *platform*, mendesak pihak berwenang, dan menggandeng selebriti dan politisi ternama supaya seruan mereka bisa lebih didengar. Keberhasilan ini terbukti dengan adanya beberapa pihak yang mulai berhenti menjual *Foie gras* setelah mendapat desakan dari INGO. Beberapa wilayah juga mulai menerapkan larangan produksi dan konsumsi *Foie gras* setelah mendapat seruan dari INGO. Tidak sedikit masyarakat yang berhenti membeli dan mengonsumsi *Foie gras* karena memilih untuk mengedepankan *animal welfare*.

Hal ini tentunya berdampak pada pasar *Foie gras* di Eropa yang mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Dalam salah satu artikelnya, Putri (2022) menyebutkan bahwa salah satu faktor menurunnya kuliner *Foie gras* karena adanya kontroversi dan larangan *Foie gras*. Dimana hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis dalam industri *Foie gras*. Penelitian tentang pasar *Foie gras* di Prancis yang diterbitkan oleh Businesscoot (2023) menyatakan bahwa permintaan dari INGO kepada masyarakat untuk menghentikan konsumsi *Foie gras* kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada produksi *Foie gras* di negara pusat *Foie gras*, Prancis. Kontroversi mengenai *force feeding* telah mengakibatkan penjualan *Foie gras* menurun. Terlebih lagi munculnya larangan terhadap penjualan *Foie gras* karena mempertimbangkan masalah etika pada hewan. Banyak negara-negara di Eropa yang sudah melarang *Foie gras*, baik itu larangan produksi dan juga larangan konsumsi. Akibatnya, distributor harus menggunakan jalur khusus untuk menjual *Foie gras* ke negara-negara yang sudah melarangnya ataupun yang sudah menutup peternakan *Foie gras*. Tidak hanya itu, beberapa produsen tentu merasakan dampak dari pelarangan *Foie gras* karena kehilangan rekan bisnis dari pemerintah dan juga lebih sulit untuk mendapatkan izin usaha.

Pembahasan

European Federation of Foie gras adalah perkumpulan produsen *Foie gras* di Eropa yang telah didirikan pada tahun 2008 di Strasbourg. Federasi ini menyatukan seluruh produsen *Foie gras* di Eropa termasuk Belgia, Bulgaria, Prancis, Hungaria, dan Spanyol. *European Federation of Foie gras* mewakili seluruh rantai produksi termasuk peternak, tempat penetasan, produsen, pengolah, dan rumah potong hewan. Tujuan dibentuknya federasi ini adalah untuk mempromosikan *Foie gras* sebagai tradisi budaya dan gastronomi yang telah berusia ribuan tahun di Eropa. Berdasarkan informasi dari *European Federation of Foie gras*, Sekitar 11.507 ton *Foie gras* diproduksi di Uni Eropa pada tahun 2022 (10.953 ton *Foie gras* bebek dan 554 ton angsa) dan ekspor *Foie gras* dari Uni Eropa ke negara ketiga mencapai 49 juta euro. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh *Animal Equality UK* menunjukkan produksi *Foie gras* di Uni Eropa mencapai 21.000 ton pada tahun 2016 (19.000 ton *Foie gras* bebek dan 2.000 ton *Foie gras* angsa). Artinya, angka tersebut mengalami penurunan drastis yang telah disebabkan oleh beberapa faktor. Prancis merupakan negara produsen *Foie gras* paling besar, sekitar 83% *Foie gras* bebek dan 25% *Foie gras* angsa secara global. Produksi *Foie gras* di Prancis mencapai 13.843 ton pada tahun 2016. Namun angka tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Prancis merupakan negara utama produsen *Foie gras*, hal ini tentu berdampak pada ekspor dan impor *Foie gras*, terutama di Eropa.

Gambar 1. Produksi Foie gras di Prancis Tahun 2010-2021



Sumber: Businesscoot.com (2023)

Merujuk pada gambar 1, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi *Foie gras* di Prancis mulai tahun 2016 hingga tahun 2021. Dimana produsen menghadapi masalah etika yang semakin meningkat. Salah satu pendorong utama pasar *Foie gras* di Prancis adalah rumah tangga yang merupakan pembeli utama *Foie gras*. Laporan ilmiah menyatakan bahwa permintaan dari INGO lingkungan atau hak-hak hewan, ataupun investigasi jurnalistik tertentu cenderung memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada penjualan. Meskipun flu burung menjadi faktor utama dalam penurunan pasar *Foie gras* di Eropa. Namun ada beberapa faktor pendukung yang juga mempunyai dampak yang signifikan seperti perubahan peraturan. Setiap peraturan yang berubah di salah satu negara tentu akan memberikan dampak tertentu. Tidak sedikit negara dan kota yang sudah melarang *Foie gras* karena *force feeding* nya. Luxemburg telah melarang pemberian makan paksa seperti yang terjadi dalam produksi *Foie gras* pada tahun 1965. Disusul oleh Jerman pada Juli tahun 1972. Norwegia juga melarang pemberian makan paksa pada Desember tahun 1974. Denmark juga menyusul pada Juni 1991. Kemudian Republik Ceko pada tahun 1993 dan Finlandia pada April tahun 1996. Polandia telah melarang pemberian makan paksa Agustus tahun 1997 dan Uni Eropa telah menetapkan larangan produksi *Foie gras* di negara-negara anggota pada bulan Juni tahun 1999.

Inggris secara efektif melarang produksi *Foie gras* di bawah interpretasi dari peraturan kesejahteraan hewan ternaknya pada tahun 2000. Kemudian Italia mengeluarkan keputusan legislatif untuk melarang produksi *Foie gras* pada tahun 2004. Tidak hanya negara-negara di Eropa, beberapa negara lainnya juga melarang *Foie gras* sehingga berdampak pada berlangsungnya ekspor *Foie gras* dari Eropa. Argentina telah melarang produksi *Foie gras* pada bulan Agustus tahun 2003 dan mengatakan bahwa “pemberian makan paksa harus dianggap sebagai penganiayaan atau tindakan kekejaman terhadap hewan, dalam hal ini terhadap angsa atau bebek”. Israel juga melarang *Foie gras* yang mulai diberlakukan dari tahun 2005. Amerika Serikat juga melarang penjualan dan produksi *Foie gras* yang dimulai pada tahun 2012. Chicago menjadi kota pertama di AS yang melarang *Foie gras* pada bulan April tahun 2006, namun berkali-kali juga membatalkan larangan tersebut hingga benar-benar ditegakkan pada Januari 2019. Sedangkan India menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan total impor *Foie gras* pada tahun 2014 (*Animal Equality UK 2019*).

Banyaknya negara yang mulai mengesahkan larangan *Foie gras* bukan tanpa sebab. Hal ini karena kontroversi *force feeding* dan masalah etika yang disuarakan oleh banyak INGO. Beberapa negara yang telah melarang *Foie gras* telah mendapat desakan dan seruan dari para aktivis INGO yang menyuarakan *animal welfare*. Seperti yang terjadi pada tahun 2014,

di mana India menjadi negara pertama yang mengeluarkan larangan nasional terhadap penjualan dan impor produk yang dibuat dengan cara dipaksa. Larangan tersebut merupakan hasil kerja *Animal Equality* dan menjadi preseden yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Foto-foto yang diambil oleh para investigator *Animal Equality* di dalam peternakan *Foie gras* di Eropa digunakan sebagai bagian dari laporan ekstensif yang diserahkan *Animal Equality* kepada Pemerintah India pada tahun 2013. Satu tahun kemudian, larangan tersebut diberlakukan. Hal ini tentu berpengaruh pada ekspor *Foie gras* dari Eropa ke India (*Animal Equality* UK 2022). Investigasi dari *Animal Equality* tersebut merupakan salah satu strategi dari TAN yang disebut politik informasi. Strategi ini digunakan dengan tujuan memberikan informasi yang tidak tersedia dari sumber-sumber yang sulit untuk dijangkau. Informasi yang telah didapat dari proses investigasi akan disebarluaskan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui tentang fakta tersebut.

Dari sudut pandang INGO, seluruh penyiksaan bebek harus segera dihentikan berdasarkan pada *animal rights* dan *animal welfare*. Meskipun angka produksi sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun hal tersebut belum dirasa cukup selama masih ada hewan yang disiksa untuk menghasilkan *Foie gras*. Banyak negara anggota Uni Eropa telah melarang produksi *Foie gras* karena adanya kekejaman di dalamnya. Namun negara-negara tersebut tidak dapat menghentikan penjualan *Foie gras* di sana. Hal ini disebabkan oleh salah satu aturan mendasar Uni Eropa yang disebut '*principle of mutual recognition*'. Sederhananya, prinsip ini memastikan bahwa produk yang legal untuk dijual di satu negara anggota UE harus legal untuk dijual di setiap negara anggota lainnya. Misalnya, jika produksi dan penjualan *Foie gras* dilegalkan di Prancis, maka semua negara UE juga harus mengizinkan produk ini dan tidak boleh melarang atau menghalangi impor atau penjualannya. Oleh karena itu, beberapa INGO menerapkan strategi politik simbolik untuk meyakinkan publik terkait peristiwa yang terjadi.

Menggunakan simbol, aksi, dan cerita-cerita tertentu yang dapat menarik perhatian. Kampanye merupakan salah satu aksi yang umum digunakan oleh para INGO untuk mengimplementasikan politik simbolik. Sebagai contoh, para aktivis dari PETA kerap melakukan kampanye anti *Foie gras* melalui representasi kostum bebek guna memberikan gambaran kepada publik bagaimana kejamnya proses produksi *Foie gras*. Pada tahun 2015, para aktivis PETA bersama kelompok perlindungan hewan lainnya seperti Albert Schweitzer Foundation, L214, dan Compassion in World Farming dan sebanyak 320.275 orang dari seluruh Eropa telah melakukan kampanye untuk mendesak *European Parliament* supaya berhenti menyediakan *Foie gras*. Para aktivis INGO juga menyerahkan lebih dari 320.000 tanda tangan petisi kepada Komisi Eropa. Banyak sekali masyarakat yang turut serta menandatangani petisi untuk menolak *Foie gras* yang artinya sudah banyak juga masyarakat yang menyadari kejamnya *force feeding* (Maulidina 2023).

INGO merasa perlu memperhatikan masalah ini lebih dalam lagi. Karena meskipun suatu negara telah melarang *Foie gras*, masih ada celah untuk terus menjual produk *Foie gras*. Seperti restoran dan toko-toko yang masih mengecer. Di Inggris, memberi makan burung secara paksa untuk menghasilkan *Foie gras* secara teknis ilegal atas dasar kesejahteraan hewan. Namun, toko dan restoran masih diperbolehkan mengimpor dan menjual *Foie gras*. Inggris mengimpor sekitar 200 ton *Foie gras* ke negaranya setiap tahun. Mengetahui hal ini, beberapa INGO segera melakukan kolaborasi untuk kampanye mendesak larangan impor *Foie gras* di Inggris. PETA, *Animal Equality* UK, dan sepuluh INGO lainnya berkoordinasi untuk mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Inggris dan juga bersama-sama mengumpulkan petisi yang telah memperoleh lebih dari 250.000 tanda tangan. Mereka juga menampilkan surat terbukanya di lembar koran Metro UK News dan menuliskan surat kepada anggota Parlemen Rishi Sunak, dimana surat tersebut dibagikan ke sosial media (*Compassion in World Farming* 2022).

Surat tersebut berisi permintaan dari seluruh INGO yang terlibat untuk mengesahkan larangan impor *Foie gras* di Inggris. Kampanye yang ditujukan kepada pemerintah Inggris merupakan desakan sekaligus sindiran pada standar ganda yang ada di sana. Dimana Inggris melarang produksi *Foie gras*, namun tetap mengizinkan impornya dari negara lain. Tentu hal tersebut tidak mengurangi konsumen di Inggris. Sebagian besar masyarakat Inggris sudah setuju pada larangan impor *Foie gras*. Hanya saja beberapa pihak dari pemerintah Inggris belum setuju jika ada kebijakan terkait larangan impor *Foie gras*.

Tidak hanya itu, salah satu pendiri INGO yaitu PETA mengirimkan surat kepada Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Den Haag untuk meminta mereka mengikuti jejak kerajaan Inggris dalam melarang *Foie gras* (PETA 2023). Pendiri PETA, Ingrid Newkirk, menuliskan suratnya dengan Bahasa Belanda yang artinya “Jika Raja Charles dapat melarang jenazah hewan yang disiksa masuk ke Istana Buckingham, Belanda pasti dapat mengadopsi kebijakan bebas *Foie gras* di kediaman kerajaannya sendiri”. Setelah mendapat surat tersebut, pihak kerajaan menanggapi dan memberitahu bahwa Kediaman Raja Willem-Alexander juga bebas dari bahan-bahan yang diproduksi secara kejam. Pihak kerajaan tidak lagi membuat masakan yang mengandung *Foie gras*. Mereka juga tidak akan pernah memesan *Foie gras* dari lokasi luar. Keputusan kerajaan Belanda tersebut tentu akan mempengaruhi perspektif masyarakat Belanda yang masih mengonsumsi *Foie gras* dan kemungkinan besar sikap Raja Willem-Alexander untuk tidak mengonsumsi *Foie gras* akan diikuti oleh masyarakatnya (PETA).

Pada tahun 2020, Walikota Strasbourg, Jeanne Barseghian, menegaskan keputusannya untuk berhenti menyajikannya di semua acara resmi kota setelah mendengar dari PETA tentang kekejaman dalam produksi *Foie gras* (Walbridge 2021). Hal ini berarti PETA menggunakan strategi politik akuntabilitas untuk menekan aktor yang lebih kuat agar menjalankan kebijakan yang sesuai dengan tujuan PETA menolak *Foie gras*. Larangan dari Walikota Strasbourg merupakan sebuah langkah signifikan bagi kota yang dulu dikenal sebagai ibu kota *Foie gras* di Prancis. Meskipun keputusan tersebut sempat memicu reaksi keras dari para produsen *Foie gras* di Prancis. Diantaranya adalah Nicolas Lechner, presiden produsen *Foie gras* di Alsace dan Vincent Heusch, karena mereka tidak bisa lagi menyediakan *Foie gras* di acara resmi yang diadakan di Strasbourg (PETA UK).

Sekalipun beberapa wilayah di Eropa sudah menetapkan larangan *Foie gras*, namun masih ada Lima negara Uni Eropa yang masih memproduksi *Foie gras* adalah Belgia, Bulgaria, Prancis, Hongaria, dan Spanyol. Oleh karena itu, PETA telah menyurati Menteri Agrikultur Belgia untuk mendesaknya agar segera melarang produksi *Foie gras* di seluruh negeri (PETA, 2017). Bagian dari surat PETA berbunyi sebagai berikut: “Produksi *Foie gras* adalah ilegal di Inggris dan lebih dari dua belas negara Eropa lainnya, termasuk Jerman, Luksemburg, dan Belanda dan semakin banyak negara di seluruh dunia yang melarang praktik kejam memberi makan burung secara paksa. Sudah saatnya Belgia mengikutinya”. Beberapa upaya INGO untuk melobi pemerintah udah berhasil dan sebagian upayanya masih belum berhasil. Keberhasilannya sudah dapat memberikan dampak pada berkurangnya produsen dan konsumen *Foie gras* di berbagai tempat.

Upaya dari para aktivis tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka melakukan berbagai macam strategi untuk menyuarakan masalah etika yang terjadi dalam produksi *Foie gras*. Flu burung tentu mempengaruhi produksi *Foie gras* karena adanya wabah di peternakan bebek dan angsa. Sedangkan advokasi dari INGO mempengaruhi produksi, penjualan, dan konsumsi sekaligus. Salah satu strategi INGO yang berpotensi merubah perspektif masyarakat terhadap *Foie gras* adalah dengan melakukan investigasi. Pada tahun 2011 dan 2012, *Animal Equality* melakukan investigasi di empat peternakan *Foie gras* di Prancis dan lima tempat di Spanyol untuk mengungkap kekejaman pemberian makan secara paksa. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan berjam-jam rekaman video dan lebih dari 500 foto yang mendokumentasikan kenyataan mengejutkan dari kehidupan bebek dan *gras* (*Animal Equality* UK 2022). PETA juga melakukan investigasi di salah satu peternakan yaitu Hudson Valley *Foie gras*, New York. Dari investigasi tersebut, ditemukan bahwa seorang pekerja harus memberi makan 500 ekor burung secara paksa sebanyak tiga kali setiap hari. Kecepatan ini membuat mereka sering memperlakukan unggas dengan kasar dan membuat mereka terluka dan menderita (Maulidina 2023).

Hasil investigasi yang telah dilakukan oleh INGO tersebut kemudian diunggah ke sosial media untuk mengungkap kekejaman *Foie gras* yang belum diketahui oleh banyak orang. Setelah publik mengetahui kejamnya produksi *Foie gras*, langkah selanjutnya adalah mereka membuat petisi agar semua orang dapat berpartisipasi pada penolakan *Foie gras* meskipun secara online. Petisi tersebut kemudian akan diajukan kepada beberapa pihak yang masih menyediakan *Foie gras*. Menurut Keck & Sikkink, strategi politik informasi dari TAN tidak hanya memberikan fakta, namun juga berusaha memberikan kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat langsung (Keck & Sikkink 1999). Oleh karena itu, beberapa INGO yang melakukan investigasi juga meminta kesaksian dari para pekerja di peternakan *Foie gras*. Bahkan beberapa aktivis juga melakukan penyamaran untuk mendapatkan lebih banyak informasi.

Usaha yang keras dari aktivis dan berbagai INGO dapat memberikan kesadaran pada masyarakat untuk berhenti menjual dan mengonsumsi *Foie gras*. Tentu pihak produsen *Foie gras* juga akan berhenti memproduksinya jika sudah tidak ada lagi permintaan dari distributor dan konsumen. Beberapa artis terkenal dan tokoh politisi Eropa bergabung dengan kampanye dari INGO. Sebagai seorang tokoh, mereka dapat mempengaruhi lebih banyak masyarakat untuk menolak *Foie gras*. *Animal Equality* telah meminta dukungan dari beberapa politisi di Inggris yaitu anggota parlemen Kerry McCarthy, anggota parlemen Henry Smith, anggota parlemen Sir Mike Penning, dan anggota parlemen Caroline Lucas dalam kampanye untuk melarang impor *Foie gras* ke Inggris. Setelah Caroline Lucas, Zac Goldsmith yang merupakan politikus sekaligus jurnalis juga bergabung dengan PETA untuk menolak *Foie gras*.

Keputusan tersebut diperoleh setelah Zac Goldsmith melihat investigasi penyamaran PETA di tahun 2013. Sedangkan beberapa selebriti Eropa juga bergabung dengan kampanye PETA untuk ikut menyuarakan penolakan *Foie gras*, diantaranya Sir Roger Moore, Paul James O'Grady, Kate Winslet, Chris Packham, Bill Oddie, dan Mark Rylence. Bahkan Sir Roger Moore dinobatkan oleh PETA sebagai duta kampanye *Foie gras* (Maulidina 2023). Keterlibatan tokoh politik dan selebriti yang berpengaruh merupakan hasil dari strategi *leverage politics* atau memanfaatkan politik. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pengaruh dan mewujudkan perubahan kebijakan dengan mengajak dan membujuk aktor-aktor yang lebih berkuasa untuk bergabung. Para aktor yang memiliki pengaruh dapat memperkuat posisi mereka di hadapan publik.

Tidak hanya itu, dalam web resmi PETA disebutkan banyak sekali keberhasilan mereka dalam menolak *Foie gras*. Karena larangan dari negara saja dirasa belum cukup, INGO tersebut menargetkan beberapa restoran dan toko mewah di Eropa terutama di Inggris, untuk berhenti menjual *Foie gras*. Berikut adalah daftar restoran dan toko yang sudah

berhenti menyediakan *Foie gras* atas permintaan INGO; *department store* mewah yang berbasis di Inggris, Harvey Nichols, telah mengakhiri penjualan *Foie gras* di semua tokonya pada tahun 2007 atas permintaan Sir Roger Moore yang mengatasnamakan PETA. Setelah itu, Selfridges yang merupakan toko serba ada kelas atas di Inggris memutuskan berhenti menyediakan *Foie gras* pada November 2009 setelah mendapat seruan dari beberapa INGO. Koalisi yang terdiri dari PETA, Compassion in World Farming, Humane Society International, Animal Aid, dan Viva! telah menandatangani sebuah surat yang menyerukan kepada *Selfridges* untuk berhenti menjual *Foie gras*. Kemudian *The British Academy of Film and Television Arts* (BAFTA) yang merupakan asosiasi perdagangan dan badan amal yang mempromosikan seni film, televisi, dan video game di Britania Raya, telah menghapus *Foie gras* dari menu restorannya pada tahun 2010 setelah mendapat permohonan dari PETA. Keputusan BAFTA juga menjadi keberhasilan yang besar karena jumlah keanggotaan BAFTA yang melebihi enam ribu. Dimana hal ini dapat mengurangi konsumen *Foie gras* di Eropa.

Semakin banyak pihak yang berhenti menyediakan *Foie gras*, maka akan semakin berkurang penjualannya. Salah satu penghargaan musik tahunan di Inggris yang dihadiri oleh banyak musisi terkenal, Brit Awards, telah menarik *Foie gras* dari menu nya pada tahun 2010 setelah PETA bersama dengan salah satu penyanyi vegetarian, Leona Lewis, memberikan keluhannya kepada Brit Awards dengan mengatakan bahwa produksi *Foie gras* melibatkan penyiksaan yang kejam pada bebek dan angsa. Kemudian salah satu perusahaan yang menciptakan teater kelas dunia, Royal Shakespeare Company, telah memutuskan untuk mengakhiri penjualan *Foie gras* baik di perusahaan dan di restorannya yang bernama Rooftop Restaurant. Pada tahun yang sama, All England Lawn Tennis dan Croquet Club (rumah bagi kejuaraan tenis Wimbledon) menghapus *Foie gras* dari menu mereka. Pada bulan September 2011, Lord's Cricket Ground yang merupakan rumah bagi olahraga kriket terkenal di dunia, juga menghapus *Foie gras* dari menunya setelah melihat rekaman hasil investigasi salah satu INGO yang diunggah ke YouTube.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh INGO tersebut telah memberikan kesadaran pada beberapa pihak untuk menjauhi *Foie gras*. Compass Group, perusahaan katering multinasional terbesar yang berpusat di Inggris, mengonfirmasi bahwa mereka telah menghapus *Foie gras* dari semua menu pada tahun 2012. Keputusan Compass Group untuk menghapus *Foie gras* merupakan keberhasilan dari upaya PETA. Dimana PETA melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan sehingga Executive Chef di Compass Group, Nick Vadis, mengirimkan email kepada PETA yang menyatakan konfirmasi bahwa Compass Group di Inggris dan Irlandia sudah setuju untuk menghapus *Foie gras*. Pada tahun 2013,

acara BBC MasterChef bersumpah tidak akan menampilkan bahan makanan *Foie gras* di acaranya. Pada tahun yang sama, Amazon UK sudah setuju untuk berhenti menjual *Foie gras* di situs webnya. Amazon menghapus lebih dari seratus produk *Foie gras* dari bagian grosir di situs webnya di Inggris setelah Viva! dan PETA mengajukan petisi kepada Amazon.

Pada 10 Februari 2021, Fortnum & Mason mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan lagi membeli produk *Foie gras* dari distributor dan akan berhenti menjualnya setelah cadangan stoknya habis. Fortnum & Mason telah mendapat berbagai desakan dari INGO selama kurang lebih 10 tahun. Karena Fortnum & Mason adalah supermarket mewah yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan, minuman, barang, hingga hampers. Fortnum & Mason juga memperjualbelikan *Foie gras*, dimana toko tersebut juga memiliki sejumlah distributor di seluruh dunia. Hal ini merupakan kemenangan bagi INGO pembela hewan karena keputusan Fortnum & Mason dapat mengurangi penyiksaan bebek dalam produksi *Foie gras* (PETA 2018). Tidak sedikit penjual dan distributor *Foie gras* yang memutuskan berhenti menjual *Foie gras* sebagai bentuk keberhasilan negosiasi dan advokasi dari INGO.

Setelah adanya larangan *Foie gras* dari berbagai pihak, mulai dari negara, perusahaan, toko, dan juga restoran. INGO PETA menyediakan alternatif vegan *Foie gras* yang diberi nama Faux Gras. Mereka bekerjasama dengan salah satu koki dari Prancis, Michelin Alexis Gauthier, untuk menciptakan resep baru sehingga para pecinta *Foie gras* tetap bisa menikmati *Foie gras* tanpa harus melibatkan penyiksaan terhadap hewan. Resep alternatif tersebut kemudian dibagikan ke media sosial. Supaya masyarakat luas lebih memilih *Fuax Gras* dibandingkan membeli *Foie gras*. Adanya alternatif ini juga dapat mengurangi pembelian *Foie gras* yang juga pasti berdampak pada ketidakstabilan pasar *Foie gras* di Eropa. Beberapa perusahaan besar yang memilih berhenti untuk menyediakan *Foie gras* juga akan mempengaruhi perspektif para pekerja nya terhadap penyiksaan hewan yang terjadi dalam proses produksi. Dalam menghentikan *Foie gras*, banyak INGO yang turut serta di dalamnya. Sedangkan satu INGO saja, contohnya PETA, sudah mendapat banyak keberhasilan yang tentu berdampak pada penjualan yang berkurang. Apalagi jika dilihat dari peran dan keberhasilan dari INGO-INGO yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa advokasi yang telah dilakukan oleh INGO untuk menghentikan kekejaman produksi *Foie gras* telah memberikan dampak pada pasar *Foie gras* di Eropa. Sehingga mengakibatkan produksi *Foie gras* di Eropa menjadi tidak stabil. Hal ini juga dapat dilihat dari menurunnya produksi di negara pusat *Foie gras* yaitu Prancis. Selain karena faktor wabah flu burung, advokasi dari INGO juga berperan besar dalam hal ini. Sudah banyak sekali keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh INGO karena beberapa pihak memilih untuk berhenti menjual dan mengkonsumsi *Foie gras*. Sebagai INGO yang fokus untuk membela hak-hak hewan dan menyuarakan *animal welfare*, mereka perlu menentang adanya kekejaman terhadap hewan seperti yang terjadi dalam produksi *Foie gras*. Oleh karena itu, banyak INGO yang berusaha menghentikan penyiksaan hewan pada produksi *Foie gras* di Eropa dengan melakukan beberapa advokasi.

Beberapa advokasi yang sudah dilakukan oleh INGO mencakup strategi sebagaimana jaringan advokasi transnasional bekerja yang meliputi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Contoh dari strategi yang dilakukan adalah mendesak pemerintah untuk mengeluarkan larangan *Foie gras*, melakukan investigasi untuk mengungkap kekejaman pada peternakan *Foie gras*, kampanye dengan mengajak politisi dan selebriti terkenal di Eropa, meminta perusahaan, toko, dan restoran untuk berhenti menyediakan *Foie gras*, dan membuat menu alternatif yang diberi nama *Faux Gras*. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat luas segera menyadari bahwa ada kekejaman pada hewan di balik produksi *Foie gras* yang menghasilkan banyak keuntungan. Meskipun beberapa pihak enggan untuk berhenti menyediakan *Foie gras*, para INGO tetap berusaha dengan melakukan berbagai macam strategi. Dari waktu ke waktu, adanya perubahan peraturan dari negara tentang larangan *Foie gras*, konsumen *Foie gras* mulai berkurang, dan beberapa toko serta restoran sudah tidak menyediakan *Foie gras*. Itulah mengapa produksi *Foie gras* juga mulai menurun. Adanya upaya dari INGO untuk menyuarakan *animal welfare* dapat meminimalisir adanya penyiksaan terhadap hewan.

Referensi

Buku atau Artikel dalam Buku

- Heath, D., & Meneley, A, 2010. “The naturecultures of *Foie gras*: Techniques of the body and a contested ethics of care”, *Food, Culture & Society*, 13(3), 421–452.
- Keck, Margaret E. & Sikkink, Kathryn, 1999. “Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics”, *UNESCO* 1999.
- Soloman, et al., 2007. “Amyloidogenic Potencial of *Foie gras*”, *Proceedings of the National Academy of Science*, vol. 104 no. 26.
- Wenzano, P. P, 2022. “Studi Rise and Fall pada Kuliner *Foie gras* dengan Pendekatan Model Bisnis”, *OSF Reprints*.

Artikel Daring

- Animal Equality UK, 2019. “Our Fight to Ban *Foie gras* Worldwide” [Online]. Di <https://animalequality.org.uk/blog/2022/03/22/our-fight-to-ban-foie-gras-worldwide/>
- Businesscoot, 2023. “The *Foie gras* Market – France” [Online]. Di <https://www.businesscoot.com/en/study/the-foie-gras-market-france>
- Euro *Foie gras*. “European Federation of *Foie gras*” [Online]. Di <https://www.eurofoiegras.com/en/home/>
- Fine Dining Lovers. “*Foie gras*: Where Is It Actually Banned?” [Online]. Di <https://www.finedininglovers.com/article/foie-gras-where-it-actually-banned>
- PETA, 2003. “The Pain Behind *Foie gras*” [Online]. Di <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/animals-used-food-factsheets/pain-behind-foie-gras/>
- PETA. “No More *Foie gras* in Strasbourg – Home of EU Parliament Bans Cruelly Produced Pâté from Official Events” [Online]. Di <https://www.peta.org.uk/media/news-releases/no-more-foie-gras-in-strasbourg-home-of-eu-parliament-bans-cruelly-produced-pate-from-official-events/>
- PETA Nederland. “Nederlands Koninklijk Huis bevestigt dat het geen weerzinwekkende *Foie gras* zal serverenNederlands Koninklijk Huis bevestigt dat het geen weerzinwekkende *Foie gras* zal serveren” [Online]. Di <https://www.peta.nl/media/nederlands-koninklijk-huis-bevestigt-dat-het-geen-weerzinwekkende-foie-gras-zal-serverennederlands-koninklijk-huis-bevestigt-dat-het-geen-weerzinwekkende-foie-gras-zal-serveren/>

PETA Nederland. “Zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima het voorbeeld van koning Charles volgen door *Foie gras* te verbieden?” [Online]. Di <https://www.peta.nl/media/zullen-koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-het-voorbeeld-van-koning-charles-volgen-door-foie-gras-te-verbieden/>

PETA UK, 2017. “*Foie gras* Production Has Been Banned in the Capital of Europe” [Online]. Di <https://www.peta.org.uk/blog/foie-gras-production-banned-capital-europe/>

PETA UK, 2018. “PETA’s *Foie gras* Campaign Highlights from Over the Years” [Online]. Di <https://www.peta.org.uk/blog/petas-foie-gras-campaign-highlights-from-over-the-years/>

Walbridge, Catherine. 2021. “Home of *Foie gras*’ Bans the Pâté from Official City Events” [Online]. Di <https://www.falstaff.com/en/news/home-of-foie-gras-bans-the-pate-from-official-city-events>

Laporan

Animal Welfare in the European Union, 2017. *European Parliament*.

The Case for a *Foie gras* Import Ban, 2019. London: *Animal Equality UK*.

Tesis

Damayanti, R, 2020. Peran INGO Save The Children dalam Menangani Kasus Stunting di Indonesia Tahun 2016-2019. Skripsi. Palembang: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya.

Maulidina, N. Q, 2023. Upaya *People for The Ethical Treatment of Animals* untuk Menghentikan Kekejaman dalam Produksi *Foie gras* di Eropa. Skripsi. Surabaya: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Media Sosial

Compassion in World Farming [@ciwf], 2020. [Twitter]. Di <https://twitter.com/ciwf/status/1519658699257745408>